



**ADENDUM 1**

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PALANGKA RAYA**

**DENGAN**

**DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 470/ 553/DKPS/XI/2023

NOMOR : 470/240/SOS/XI/2023

**TENTANG**

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN  
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS  
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Nopember** tahun **Dua ribu dua puluh Tiga** bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si.**  
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **H.RIDUAN.A.M.d.Kep.,SKM.M.M.**  
Alamat : Jalan G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya (73111)  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor : 470/5.2/DKPS/I/2022 dan Nomor : 060/51/SOS-Sekre I/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Sosial Kota Palangka Raya , selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”;
2. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK** dan jangka waktu; 2 ( dua) tahun sejak ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk Adendum Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 2** **Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya ;
- c. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa nomor Penerima Bantuan dan Jenis bantuan yang diterima sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;

- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module* ;
  - e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
  - f. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
  - g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
  - h. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
  - i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
  - j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3  
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
  - b. mendapatkan data balikan berupa nomor Penerima Bantuan dan Jenis bantuan yang diterima dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan;
  - c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**; dan
  - d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 9 (sembilan) elemen data NIK dengan no. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*; dan

b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

3. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4  
Jangka Waktu

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 8 Nopember 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal II**

Adendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:

- a. Adendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Adendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos.,M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690308 199003 1007

**PIHAK KEDUA**



**H.RIDUAN, A.M.d., SKM.M.M.Kes.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19711206 199403 1 006